



# LAPORAN KINERJA

KPP MADYA SEMARANG

dip

2024

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 ini disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2011 tentang Sistem, Bentuk, Isi dan Laporan Rutin di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

LAKIN Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang terdiri dari pendahuluan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024, Rencana strategis dan penetapan kinerja tahun 2024, dan akuntabilitas kinerja tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pencapaian visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak.

LAKIN yang telah disusun ini diharapkan dapat memberi informasi tentang potret kinerja yang telah dilakukan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu mencapai target penerimaan yang diamanahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, melalui beberapa program, kegiatan, dan subkegiatan selama tahun 2024.

Semoga apa yang disajikan dalam LAKIN Tahun 2024 ini dapat menjadi pedoman bagi keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2025. Seluruh jajaran keluarga besar KPP Madya Semarang terus berusaha dan berkomitmen tinggi mencapai kinerja yang ditetapkan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Semarang, 22 Januari 2025

Kepala KPP Madya Semarang



Ditandatangani secara elektronik

Artiek Purnawestri

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	1
1. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak .....	1
2. Tujuan dan Sasaran beserta Hasil Capaiannya .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
i. Jumlah Wajib Pajak dan Sumber Daya Manusia .....	3
ii. Kinerja Tahun 2024 .....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	8
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA KPP MADYA SEMARANG KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN .....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	10
NILAI KINERJA ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I .....	11
i. Indikator Kinerja Utama (IKU) 01a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak ....	13
ii. Indikator Kinerja Utama (IKU) 01b-CP : Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas .....	14
i. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).....	16
ii. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2b-CP: Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi .....	17
i. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM).....	19
i. Indikator Kinerja Utama (IKU) 4a-CP: Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan .....	21
ii. Indikator Kinerja Utama (IKU) 4b-N : Indeks kepuasan pelayanan dan efektifitas penyuluhan .....	22
i. Indikator Kinerja Utama (IKU) 5a-CP : Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis .....	23
i. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6a-CP: Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis.....	24
ii. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6b-N: Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan. ....	27
iii. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6c-N: Efektifitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu .....	28
i. Indikator Kinerja Utama (IKU) 7a-CP: Tingkat efektivitas pemeriksaan dan	

penilaian .....	29
ii. Indikator Kinerja Utama (IKU) 7b-CP: Tingkat Efektivitas Penagihan.....	30
iii. Indikator Kinerja Utama (IKU) 7c-N: Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.....	31
i. Indikator Kinerja Utama (IKU) 08a-CP: Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan .....	31
i. Indikator Kinerja Utama (IKU) 09a-N: Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM .....	33
ii. Indikator Kinerja Utama (IKU) 9b-N: Indeks Penilaian Integritas Unit .....	33
iii. Indikator Kinerja Utama (IKU) 9c-N: Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko .....	34
i. Indikator Kinerja Utama (IKU) 10a-CP: Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	36
Kinerja Lainnya .....	37
Realisasi Anggaran .....	37
BAB IV PENUTUP .....	38

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Perubahan demi perubahan yang terjadi di Indonesia berlangsung dengan cepat dan telah memunculkan nuansa dan paradigma baru yang sangat berbeda dengan paradigma lama. Masyarakat semakin demokratis dan kritis dalam menilai kinerja pemerintah, termasuk kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Masyarakat akan selalu menuntut untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan serta mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel merupakan sesuatu yang harus diwujudkan dan terus diperbaiki.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan gelombang reformasi birokrasi dan reformasi kebijakan di bidang perpajakan. Reformasi birokrasi dan kebijakan tersebut dilakukan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak sesuai dengan visi dan misi DJP sekaligus untuk meningkatkan penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

### 1. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

Visi DJP yaitu:

*“Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.”*

Untuk mengimplementasikan visi sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pajak telah merumuskan misinya yaitu:

*“Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:*

- 1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;*
- 2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;*
- 3. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan*
- 4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.”*

Misi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan DJP adalah untuk menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan untuk digunakan membiayai penyelenggaraan negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.

## **2. Tujuan dan Sasaran beserta Hasil Capaiannya**

KPP Madya Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Operasionalisasi KPP Madya Semarang dimulai pada tanggal 9 April 2007.

Pada tahun 2024 Wajib Pajak KPP Madya Semarang dengan status aktif berjumlah 1.833 Wajib Pajak yang terdiri atas 1.480 Wajib Pajak Pusat dan 353 Wajib Pajak Cabang serta 1.586 Wajib Pajak Badan dan 247 Orang Pribadi.

Pada awal tahun 2024, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Nomor: KEP-82/WPJ.10/2024 telah ditetapkan target penerimaan tahun 2024 KPP Madya Semarang yaitu sejumlah Rp14.135.857.833.559, namun kemudian terjadi beberapa kali revisi target, sehingga pada akhir 2024 melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Nomor: KEP-419/WPJ.10/2024 target KPP Madya Semarang terakhir berubah menjadi Rp13.937.439.242.000.

Berdasarkan data dari aplikasi appportal, realisasi penerimaan bruto sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.872.473.420.769 dan restitusi untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp908.427.169.789. Sehingga penerimaan netto KPP Madya Semarang adalah sebesar Rp13.964.046.250.985 atau 100,19% dari target penerimaan tahun 2024.

## BAB I PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang adalah melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- c. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- f. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- g. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- h. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- i. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- j. pemutakhiran basis data perpajakan;
- k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- m. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- n. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- o. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- p. pelaksanaan administrasi kantor.

### **i. Jumlah Wajib Pajak dan Sumber Daya Manusia**

KPP Madya Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan efektif beroperasi mulai pada tanggal 9 April 2007.

**Tabel 1.1 : Jumlah Wajib Pajak Madya Berdasarkan Tempat Kegiatan Usaha**

Seksi	PUSAT	CAB	Total
Pengawasan I	221	88	309
Pengawasan II	257	65	322
Pengawasan III	270	64	334
Pengawasan IV	227	48	275
Pengawasan V	253	45	298
Pengawasan VI	252	43	295
<b>Grand Total</b>	<b>1480</b>	<b>353</b>	<b>1833</b>

**Tabel 1.2 : Jumlah Wajib Pajak Madya Berdasarkan Jenisnya**

Seksi	Badan	OP	Total
Pengawasan I	276	33	309
Pengawasan II	278	44	322
Pengawasan III	285	49	334
Pengawasan IV	233	42	275
Pengawasan V	254	44	298
Pengawasan VI	260	35	295
<b>Grand Total</b>	<b>1586</b>	<b>247</b>	<b>1833</b>

**Tabel 1.3 : Jumlah Wajib Pajak Madya Berdasarkan Sektor Usaha**

Kode Sektor	Kategori Sektor	Jumlah
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	11
<b>C</b>	Industri Pengolahan	419
<b>D</b>	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	18
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	11
<b>F</b>	Konstruksi	43
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	704
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	65
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	25
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	22
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	173
<b>L</b>	Real Estate	26
<b>M</b>	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	47
<b>N</b>	Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	45
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	12
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34
<b>R</b>	Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi	3
<b>S</b>	Kegiatan Jasa Lainnya	12
<b>Z</b>	Pegawai	130
<b>Grand Total</b>		<b>1833</b>

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di KPP Madya Semarang pada tahun 2024 terdiri 117 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.4 : Jumlah Pegawai KPP Madya Semarang berdasarkan Jabatan**

<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
Kepala Kantor	1
Kepala Seksi	9
Kepala Subbag	1
Account Representative	39
Asisten Penilai Pajak Penyelia	0
Bendaharawan	1
Juru Sita	2
Pelaksana	26
Pemeriksa Pajak Madya	7
Pemeriksa Pajak Muda	11
Pemeriksa Pajak Pelaksana	2
Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan	5
Pemeriksa Pajak Pertama	4
Penyuluh Pajak Ahli Muda	2
Penyuluh Pajak Ahli Pertama	2
Asisten Penyuluh Pajak Mahir	2
Sekretaris	1
<b>Total</b>	<b>115</b>

Dari 39 Account Representative, dibagi lagi menjadi 6 Seksi yang menjalankan fungsi penggalan potensi. Sejumlah 39 AR yang berada di seksi Pengawasan I, II, III, IV, V dan VI secara rata-rata, 1 AR melakukan pengawasan terhadap 45 sampai 46 Wajib Pajak.

## ii. Kinerja Tahun 2024

### 1.1.1. Capaian Penerimaan Berdasarkan Jenis Pajak

KPP Madya Semarang diberikan rencana penerimaan tahun 2024 sebesar Rp14.135.857.833.559, namun kemudian terjadi beberapa kali revisi target pada akhir 2024 sehingga target KPP Madya Semarang terakhir berubah menjadi Rp13.937.439.242.000. Realisasi penerimaan bruto sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.872.473.420.769 dan restitusi untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp908.427.169.789. Sehingga penerimaan netto KPP Madya Semarang adalah sebesar Rp13.964.046.250.985 atau 100,19% dari target penerimaan tahun 2024. Penerimaan ini mengalami pertumbuhan bruto sebesar 7,41% dan pertumbuhan netto sebesar 10,48%. Rincian penerimaan berdasarkan jenis pajak dan sektor usaha adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 : Realisasi Penerimaan Berdasarkan Jenis Pajak**

Jenis Pajak	Target	MPN	Netto	Tahun Lalu	Pertumbuhan	Pencapaian
<b>PPN dan PPnBM</b>	<b>10.362.629.942.000</b>	<b>10.875.186.458.098</b>	<b>10.168.604.553.870</b>	<b>9.490.906.201.614</b>	<b>7,14%</b>	<b>98,13%</b>
411211 - PPN Dalam Negeri	9.208.323.942.000	9.739.878.085.540	9.033.840.737.993	8.237.976.335.418	9,66%	98,11%
411212 - PPN Impor	832.048.000.000	818.874.807.999	818.640.817.999	821.687.721.771	-0,37%	98,39%
411219 - PPN Lainnya	322.258.000.000	316.152.529.148	316.152.529.148	430.701.254.997	-	26,60%
411221 - PPnBM Dalam Negeri	0	281.035.411	-29.531.270	530.413.428	-	105,57%
411222 - PPnBM Impor	0	0	0	10.476.000	-	100,00%
<b>PPH Non Migas</b>	<b>3.573.527.058.000</b>	<b>3.924.043.468.638</b>	<b>3.794.084.370.346</b>	<b>3.141.569.346.103</b>	<b>20,77%</b>	<b>106,17%</b>
411126 - PPh Pasal 25/29 Badan	1.343.621.899.000	1.589.100.432.485	1.491.776.846.764	1.285.617.329.071	16,04%	111,03%
411121 - PPh Pasal 21	1.216.240.542.000	1.195.916.716.363	1.180.612.386.071	938.326.285.798	25,82%	97,07%

411128 - PPh Final & FLN	350.913.000.000	414.706.595.679	389.610.217.385	378.690.037.003	2,88%	111,03%
411127 - PPh Pasal 26	197.625.000.000	220.744.324.523	219.416.285.657	66.118.917.033	231,85%	111,03%
411123 - PPh Pasal 22 Impor	179.140.000.000	199.458.941.338	199.457.941.338	199.156.975.755	0,15%	111,34%
411124 - PPh Pasal 23	173.986.000.000	188.889.961.752	193.170.125.315	158.225.904.739	22,09%	111,03%
411122 - PPh Pasal 22	65.611.000.000	68.038.914.051	72.861.357.107	78.824.046.963	-7,56%	111,05%
411125 - PPh Pasal 25/29 OP	45.623.617.000	46.334.545.527	46.328.042.221	35.775.596.991	29,50%	101,54%
411129 - PPh Non Migas Lainnya	766.000.000	853.036.920	851.168.488	834.252.750	2,03%	111,12%
<b>Pendapatan atas PL dan PIB</b>	<b>1.282.242.000</b>	<b>1.486.888.816</b>	<b>1.356.539.816</b>	<b>1.477.615.644</b>	<b>-8,19%</b>	<b>105,79%</b>
411611 - Bea Meterai	1.271.242.000	1.474.075.481	1.343.726.481	1.330.710.777	0,98%	105,70%
411621 - Bunga Penagihan PPh	11.000.000	11.990.705	11.990.705	132.283.899	-	90,94%
411622 - Bunga Penagihan PPN	0	763.662	763.662	14.620.968	-	94,78%
411619 - Pajak Tidak Langsung Lainnya	0	58.968	58.968	0	100,00%	0,00%
<b>PPh Migas</b>	<b>0</b>	<b>20.507.410</b>	<b>308.953</b>	<b>-5.940.577</b>	<b>105,20%</b>	<b>0,00%</b>
411111 - PPh Minyak Bumi	0	20.198.457	0	-6.420.000	100,00%	0,00%
411112 - PPh Gas Alam	0	308.953	308.953	0	100,00%	0,00%
411119 - PPh Gas Alam Lainnya	0	0	0	479.423	-	100,00%
411141 -	0	0	0	1.828.681.992	-	100,00%
411241 -	0	0	0	3.357.206.596	-	100,00%
411148 -	0	0	0	29.105.706	-	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>13.937.439.242.000</b>	<b>14.800.737.322.962</b>	<b>13.964.045.772.985</b>	<b>12.639.162.217.078</b>	<b>10,48%</b>	<b>100,19%</b>

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-467/KMK/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2018 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-47/MK.1/2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Tahun 2014 dan Penyusunan Kontrak Kinerja mulai Tahun 2015 di lingkungan Kementerian Keuangan, maka disusunlah Kontrak Kinerja dengan memperhatikan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), Target IKU, dan manual IKU Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang tahun 2024.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KPP MADYA SEMARANG  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan Hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85%

		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%

Selain Kontrak Kinerja, disusun pula Rencana Kerja Organisasi (RKO) KPP Madya Semarang. RKO berfungsi sebagai acuan Organisasi dalam melaksanakan Kontrak Kinerja yang telah disepakati agar target yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja dapat tercapai.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja meliputi pengukuran dan evaluasi kinerja serta analisis pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja berikut ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan yang ditetapkan indikator kinerja dan capaian indikator kerjanya.

#### **1. Capaian Kinerja Organisasi**

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2024 dan realisasi penerimaan sampai dengan 31 Desember 2024, capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Madya Semarang sebesar 110,32 dengan perincian sebagai berikut:

**NILAI KINERJA ORGANISASI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG**  
**TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	103,14
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							103,14
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,19%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,19
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	107,17	Max	P/L	19,00%	42,22%	107,17
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	104,58
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108,53
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,16%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,16
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	120,01%	Max	P/L	19,00%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,63
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,63%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,63
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,91
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,73
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,46%	Max	E/M	21,00%	50,00%	109,46
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,13
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,60%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,60
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	111,81%	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,81
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	103,85%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00

	Alat Keterangan								
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>								25,00%	116,91
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,81	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,49	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,49	
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,94	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,87	
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11	
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00	
Nilai Kinerja Organisasi								110,32	

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Madya Semarang berada diatas angka 100% atau dengan kata lain semua target yang ditetapkan berdasarkan IKU, dapat dicapai oleh KPP Madya Semarang dengan maksimal. Secara keseluruhan, Nilai Kinerja Organisasi KPP Madya Semarang untuk tahun 2024 adalah sebesar 110,32.

3. *Evaluasi dan Analisis Kinerja*

**Sasaran Strategis (SS) 1: Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal (*Stakeholders Prespective*).**

Evaluasi dan Analisis Kinerja atas capaian IKU KPP Madya Semarang tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

**i. Indikator Kinerja Utama (IKU) 01a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak**

Realisasi penerimaan pajak KPP Madya Semarang pada tahun 2024 mencapai angka 100,19% atau sebesar Rp13.964.046.250.985 sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

**Tabel II.1**

**Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024**

Target	Realisasi	(%)
Rp13.937.439.242.000	Rp13.964.046.250.985	100,19%

Target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil tercapai karena beberapa faktor sebagai berikut :

- Penerimaan PPM yang meningkat seiring naiknya pembayaran PPN dari para produsen rokok lapis kedua
- Sektor perdagangan besar mulai menunjukkan peningkatan kegiatan usaha
- Hasil kegiatan pengujian kepatuhan material baik dari kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan

Pengamanan penerimaan pajak dilakukan dengan beberapa tindakan diantaranya:

- Meningkatkan pengawasan pembayaran masa dengan melakukan pengawasan sesuai periode pembayaran per jenis pajak
- Optimalisasi pemanfaatan data pemicu dan data penguji prioritas, data penguji tambahan di approweb

- Pengawasan Wajib Pajak KLU tertentu dan pengawasan WP secara sektoral
- Optimalisasi pemanfaatan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan BPJS
- Meningkatkan kualitas analisis pemenuhan kewajiban perpajakan WP dengan bedah WP atau dengan memaksimalkan peranan tim FPP dalam analisis WP
- Memahami proses bisnis Wajib Pajak dengan melakukan kunjungan kerja (visit) untuk dapat menindaklanjuti SP2DK yang telah dikirim
- Percepatan penyelesaian Potensi Approweb, percepatan penyelesaian LHPT/SP2DK/LHP2DK
- Melaksanakan bedah Wajib Pajak dalam rangka penggalan potensi dan pembuatan LHPt dan SP2DK komprehensif.
- Komunikasi lebih intensif ke Wajib Pajak
- Melakukan mitigasi restitusi dengan baik

**ii. Indikator Kinerja Utama (IKU) 01b-CP : Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

Tahun 2024 pertumbuhan penerimaan pajak bruto ditargetkan sebesar 100% sedangkan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar 107,17%.

**Tabel II.2**  
**Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto**

<b>Data</b>	<b>Realisasi</b>		<b>Realisasi Komponen</b>	<b>Indeks Capaian IKU</b>
Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan	107,41%		104,33%	107,17%
Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan	102,8%			
Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	Triwulan I	3,84%	110,00%	
	Triwulan II	8,00%		
	Triwulan III	1,09%		
	Triwulan IV	2,35%		

Upaya maksimal telah dilakukan untuk dapat mencapai target pertumbuhan penerimaan pajak bruto antara lain:

- Pengawasan Pembayaran Pajak yang merupakan Penerimaan Rutin dengan menggunakan tools yang ada (engine 170, apportal dll) serta berkoordinasi dengan BC dalam rangka pengawasan penerimaan dari sektor Rokok/MMEA
- Mengoptimalkan program program aksi penggalan potensi yang telah dilakukan
- Komunikasi yang lebih intensif sehingga perkembangan kondisi WP dapat diperkirakan dengan akurat dan pengawasan pembayaran masa WP.
- Mengoptimalkan data pemicu, data penguji prioritas, data penguji tambahan yang terdapat di approweb.
- Melakukan kunjungan kerja (visit lokasi) untuk menindaklanjuti SP2DK yang telah dikirim

- Meningkatkan pengawasan pembayaran masa dengan melakukan pengawasan sesuai periode pembayaran per jenis pajak
- Mencari data pembanding untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan : BC, BPJS
- Meningkatkan kegiatan analisis bersama DJP-DJBC (bedah kasus WP)

**Sasaran Strategis 2: Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi (Customer Perspective)**

**i. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 mencapai angka 100,16% dari target 100%

**Tabel II.3**

**Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

Target	Realisasi	Persentase
13.032.943.323.000	13.053.827.156.290	100.16%

Tercapainya target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 dikarenakan beberapa hal yaitu :

1. Kenaikan pembayaran PPN dari para produsen rokok lapis kedua
2. Kenaikan pembayaran dari Wajib Pajak non grup Djarum yang mendongkrak realisasi penerimaan PPM KPP Madya Semarang
3. Extra Effort dari Account Representative untuk pembayaran di tahun pajak berjalan
4. Dinamisasi PPh Pasal 25 berdasarkan himbauan dari Account Representative

Upaya yang telah dilakukan untuk dapat mencapai target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) antara lain:

1. Optimalisasi pemanfaatan data matching data pemicu di aroweb
2. Meningkatkan pengawasan pembayaran masa dengan melakukan pengawasan sesuai periode pembayaran (3 hari setelah jatuh tempo pembayaran)
3. Meningkatkan pengawasan pembayaran masa
4. Segera menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran

**ii. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2b-CP: Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

Perbandingan antara target dan realisasi WP yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan dan PPh Orang Pribadi disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel II.4**

**Perbandingan Target dan Realisasi Kepatuhan Formal WP**

Target WP lapor	Realisasi WP lapor	Indeks Capaian
1.436	1.451	120%

Target persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Madya Semarang tahun 2024 berhasil tercapai dikarenakan adanya beberapa faktor, beberapa diantaranya adalah :

1. Mengirimkan WA Blast secara periodik untuk mengingatkan kewajiban pelaporan SPT
2. Mengadakan edukasi untuk wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan
3. Melakukan himbauan pelaporan SPT via surat dan via pesan singkat
4. Menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2023 dan SPT Tahunan PPh Badan 2023 dan tidak mengajukan penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh.

5. Melakukan kegiatan persuasif ke Wajib Pajak untuk lapor SPT PPh Badan 2023 lebih awal
6. Menelpon *contact person* Wajib Pajak dan menanyakan kendala yang dihadapi dalam melaporkan SPT Tahunan

**Sasaran Strategis 3: Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi  
(Customer Perspective)**

**i. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 mencapai angka Rp910.219.094.695 atau 100.63% dari target.

**Tabel II.5**

**Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)**

Target	Realisasi	Persentase
904.495.919.000	910.219.094.695	100.63%

**Tabel II.6**

**Rincian Penerimaan Pajak dari Jenis Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)**

Jenis PKM		Target PKM	Realisasi	Persentase
a.	Edukasi	1,428,118,000	1,431,117,651	100.21%
b.	Pengawasan & PKM Lainnya	387,447,778,000	390,059,617,359	100.67%
c.	Pemeriksaan	424,219,876,000	426,555,818,090	100.55%
d.	Penegakan Hukum	10,077,123,000	10,097,836,868	100.21%
e.	Penagihan	81,323,024,000	82,074,704,727	100.92%
<b>TOTAL PKM</b>		<b>904,495,919,000</b>	<b>910,219,094,695</b>	<b>100.63%</b>

Tercapainya target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 dikarenakan beberapa hal yaitu:

1. Penerbitan SP2DK dari Account Representative yang diikuti dengan pembayaran oleh wajib pajak
2. Pembayaran STP oleh wajib pajak sebelum jatuh tempo pembayaran
3. Pengusulan Pemeriksaan melalui DSPP yang selektif dan potensial
4. Penyelesaian pemeriksaan terutama atas pemeriksaan yang memiliki potensi penerimaan signifikan yang dapat cair pada 2024
5. Pelaksanaan penagihan pasif dan aktif
6. Pelaksanaan Penegakan Hukum yang efektif
7. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) melalui edukasi yang tepat sasaran

Upaya yang telah dilakukan untuk dapat mencapai target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) antara lain:

1. Melaksanakan bedah wajib pajak dalam rangka penggalan potensi dan pembuatan LHPt dan SP2DK komprehensif
2. Percepatan penyelesaian potensi approweb, percepatan LHPT/SP2DK/LHP2DK
3. Optimalisasi pemanfaatan data pemicu, data penguji prioritas, dan data penguji tambahan di approweb
4. Komunikasi lebih intensif ke Wajib Pajak untuk segera menyelesaikan SP2DK komprehensif yang telah dikirim
5. *Joint Analysis* atas Pengawasan Wajib Pajak antara Seksi Pengawasan (*Account Representative*) dan Fungsional Pemeriksa Pajak
6. Percepatan penyelesaian pemeriksaan
7. Komunikasi yang efektif kepada Wajib Pajak yang diperiksa dan persuasi untuk melakukan pembayaran atas SKP/STP yang terbit
8. Pelaksanaan penagihan pasif dengan cara pemanggilan Wajib Pajak yang kemudian dilakukan konseling secara persuasif
9. Pelaksanaan penagihan aktif dengan cara menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Pelaksanaan penyitaan, Pelaksanaan pemblokiran, dan Pencegahan Penunggak Pajak
10. Penegakan hukum melalui pemeriksaan pajak dengan mengutamakan pengungkapan kebenaran oleh Wajib Pajak yang sedang diperiksa
11. Penegakan hukum melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I
12. Kolaborasi penegakan hukum antara KPP Madya Semarang bersama Tim Penyidik Kanwil DJP dalam proses Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan
13. Keterlibatan Fungsional Penyuluh dalam melakukan edukasi yang bermuara pada analisis data dan himbauan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan pembetulan SPT

**Sasaran Strategis 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif**  
**(Internal Process Perspective)**

**i. Indikator Kinerja Utama (IKU) 4a-CP: Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

Perbandingan antara target dan realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Madya Semarang tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel II.7**

**Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan**

2024			
Uraian	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU
Rasio Kegiatan	31	123	120%
Rasio Perubahan Perilaku Lapor	15	12	
Rasio Perubahan Perilaku Bayar	15	44	

Realisasi persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 adalah 88,80% dari target 74% sehingga mencapai target yang ditetapkan dengan indeks capaian IKU maksimal atau sebesar 120,00%.

Sampai bulan Desember tahun 2024 telah direalisasikan edukasi dan penyuluhan sebanyak 123 kegiatan dari target 31 Realisasi jumlah WP yang berubah perilaku lapor sebanyak 12 dari 15 Wajib Pajak. Realisasi jumlah WP yang berubah perilaku bayar sebanyak 44 dari 15 Wajib Pajak. Kegiatan edukasi dan sosialisasi pada tahun 2024 123. Kegiatan edukasi dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh tim penyuluh KPP Madya Semarang ini diharapkan bisa memberi tambahan pengetahuan bagi Wajib Pajak.

**ii. Indikator Kinerja Utama (IKU) 4b-N : Indeks kepuasan pelayanan dan efektifitas penyuluhan**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan pelayanan yang efektif pada Internal Process perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan DJP dan tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan.

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Target nilai indeks hasil survei yang harus dicapai KPP Madya Semarang adalah 100%. KPP Madya Semarang berhasil mencapai angka tersebut dan mendapatkan nilai indeks hasil survei sebesar 109.46% dengan capaian IKU indeks kepuasan pelayanan dan efektifitas penyuluhan adalah 109,46%. Berikut adalah detail nilai indeks tahun 2024 KPP Madya Semarang.

**Tabel II.8**  
**Nilai Indeks KPP Madya Semarang Tahun 2024**

<b>Indeks</b>	<b>Nilai</b>	<b>Nilai IKU KPP</b>
Indeks Kepuasan Pelayanan	88.84	109.46
Indeks Efektivitas Penyuluhan	87.63	

KPP Madya Semarang akan terus mengupayakan peningkatan efektivitas kegiatan penyuluhan dan edukasi setiap tahunnya. Hasil yang diperoleh pada tahun 2024, menjadi titik ukur bagi KPP Madya Semarang agar kedepannya dapat

memberikan penyuluhan dan edukasi yang lebih efektif kepada seluruh Wajib Pajak.

**Sasaran Strategis 5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif (*Internal Process Perspective*)**

**i. Indikator Kinerja Utama (IKU) 5a-CP : Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis**

Perbandingan antara target dan realisasi Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel II.9**

**Perbandingan Target dan Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis**

Uraian	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU (%)
Jumlah Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti	3.724	4.982	120,00%
Jumlah Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25	103	196	
Jumlah Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan	306	599	

Realisasi persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis tahun 2024 adalah 120% sehingga mencapai target yang ditetapkan dengan indeks capaian IKU maksimal atau sebesar 120%.

Target persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis KPP Madya Semarang tahun 2024 berhasil tercapai dikarenakan adanya beberapa faktor, beberapa diantaranya adalah :

1. Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran Wajib Pajak
2. Menindaklanjuti data matching di approweb

3. Melakukan pengawasan pembayaran per jenis pajak sesuai jatuh tempo
4. Menindaklanjuti daftar nominatif dinamisasi PPh Pasal 25 yang telah diturunkan oleh Kanwil.
5. Melanjutkan menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran Wajib Pajak
6. Melakukan pengawasan bersama dengan DJBC atas Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas perpajakan
7. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan BC untuk memperoleh data CK1

**Sasaran Strategis 6: Pengujian kepatuhan material yang efektif  
(Internal Process Perspective)**

**i. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6a-CP: Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis**

Perbandingan antara target dan realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel II.10**

**Perbandingan antara target dan realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis**

Uraian		Realisasi/ Target	Realisasi
Capaian Penelitian (maks 120%)	Jumlah bobot LHPt WP Strategis	761,40	120,00%
	Jumlah Target LHPt seluruh jenis pajak	507,00	
Capaian Tindak Lanjut	Jumlah bobot LHP2DK dari DPP	652,65	120,00%
	Target LHP2DK dari DPP	507	
	Jumlah LHP2DK WP Strategis atas SP2DK Tahun 2023 yang Ditindaklanjuti	125,60	
	Target SP2DK DPP Tahun 2023 yang Ditindaklanjuti	125,60	
	Realisasi LHP2DK dari SP2DK Outstanding	125,60	
	Target LHP2dk dari SP2DK	132	

	Outstanding		
--	-------------	--	--

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis tahun 2024 mendapatkan nilai capaian maksimal yaitu 120%.

Penghitungan capaian IKU penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis dilakukan dengan menjumlah 40% Capaian Penelitian, dan 60% Capaian Tindak Lanjut. KPP Madya Semarang pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dan mendapatkan poin maksimal baik dalam capaian penelitian, maupun capaian tindak lanjut.

Untuk capaian penelitian dari target 507, berhasil terealisasi sebanyak 761,40 Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Wajib Pajak Strategis. Sedangkan untuk target capaian tindak lanjut, terdapat 3 komponen penghitungan yaitu 50% Capaian Penyelesaian DPP, 30% Capaian Penyelesaian SP2DK atas DPP Tahun 2023 dan 20% Capaian Penyelesaian SP2DK Outstanding. Dari target 507, berhasil terealisasi sebanyak 652,65 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) dari DPP. Untuk capaian penyelesaian SP2DK atas DPP Tahun 2023, dari target 125,60 berhasil memperoleh realisasi sebesar 125,60. Dan untuk capaian penyelesaian SP2DK Outstanding, dari target 132, terealisasi 125,60 LHP2DK dari SP2DK Outstanding. Pencapaian target tersebut mencerminkan bahwa KPP Madya Semarang telah melakukan kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Target persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis di KPP Madya Semarang tahun 2024 berhasil tercapai dikarenakan adanya beberapa faktor, beberapa diantaranya adalah :

- Komunikasi intensif ke Wajib Pajak untuk segera menindaklanjuti SP2DK komprehensif yang diterbitkan
- Mengundang konseling sebagai tindaklanjut SP2DK
- Percepatan pembuatan LHP2DK atas SP2DK yang masih outstanding dari KPP Pratama baik yang sudah dilakukan pembayaran dengan mengundang konseling maupun yang belum ditanggapi lebih dari 14

hari untuk diusulkan pemeriksaan

- Percepatan pembuatan LHPT Komprehensive untuk DPP Semester II
- Penggalan potensi Wajib Pajak berbentuk CV dan WP Grup

**ii. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6b-N: Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan.**

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sesuai data pada laman mandor-djp/ disebutkan bahwa target Pemanfaatan Data STP sejumlah 4.902 dengan capaian realisasi STP terbit sejumlah 5.481 dengan persentase 112.12%.

Kemudian untuk Pemanfaatan Data Matching memiliki target untuk Data Pemicu dan Data Matching (70% Data Pemicu) masing masing sebesar 954 dan 651 dengan realisasi ditindaklanjuti oleh AR sebesar 239 dan ditindaklanjuti WP sebesar 784, sehingga diperoleh persentase data matching sebesar 119.52%.

Dengan realisasi yang tercapai diatas target, maka untuk Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data pada KPP Madya Semarang adalah sebesar 117,31%.

**Tabel II.11**

**Perbandingan antara target dan realisasi Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan**

Uraian		Target	Realisasi	Persentase	Persentase Capaian IKU
Pemanfaatan Data STP	Target STP	2.165	3.053	141,02%	120%
Pemanfaatan Data Matching	Data Matching	1.157		120%	
	Ditindaklanjuti AR		118		
	Ditindaklanjuti WP		1.468		

Target persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan di KPP Madya Semarang tahun 2024 berhasil tercapai dikarenakan adanya beberapa faktor, beberapa diantaranya adalah :

- Menerbitkan STP selain tahun berjalan
- Membuat DPP yang memiliki irisan dengan data pemicu

**iii. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6c-N: Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu**

IKU efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu merupakan IKU baru yang dilakukan pada KPP Madya Semarang. Sesuai data pada laman mandor-djp/ disebutkan bahwa capaian IKU yang diperoleh KPP Madya Semarang adalah sebesar 111,81% dengan rincian per masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Jenis Komponen	Capaian per Komponen	Capaian IKU
Komponen 1 (pelaporan)	120%	111,81%
Komponen 2 (Kinerja per Aktor)	120%	
Komponen 3 (Penyediaan bahan baku pemeriksaan)	92,69%	

Target persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan di KPP Madya Semarang tahun 2024 berhasil tercapai dikarenakan adanya beberapa faktor, beberapa diantaranya adalah :

- Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Komite Kepatuhan jauh sebelum jatuh tempo
- Melakukan imbauan kepada seluruh Seksi Pengawasan, Seksi P3 dan Seksi Pelayanan untuk mengisi laporan di tiap akhir triwulan
- Melakukan koordinasi dengan kanwil mengenai perhitungan bahan baku Pemeriksaan

**Sasaran Strategis 7: Penegakan hukum yang efektif (*Internal Process Perspective*)**

**i. Indikator Kinerja Utama (IKU) 7a-CP: Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian**

Perbandingan antara target dan realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel II.12**

**Perbandingan antara target dan realisasi**

**Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan**

Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Indeks Capaian IKU
Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	75%	75,75%	101,00%	120%
Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan	100%	106,48%	106,48%	
Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	100%	79,19%	79,19%	
Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	75%	94,01%	120%	
Persentase ketetapan Terbit dibanding dengan Nilai Restitusi	70%	71,28%	101,82%	

Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan tahun 2024 mendapatkan nilai capaian maksimal yaitu 120%.

Formula penghitungan IKU tingkat efektivitas pemeriksaan adalah dengan cara menambahkan (25% x Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP)

+ (25% x Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) + (25% x Persentase Realisasi

Penyelesaian Pemeriksaan) + (20% x Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu) + (5% Persentase Nilai SKP Terbit dibanding dengan Nilai Restitusi).

Komponen IKU Penilaian sudah diakui sebanyak 6 kegiatan penilaian oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I sehingga capaian IKU Penilaian sebesar 120%. Pada tahun 2024, KPP Madya Semarang berhasil mendapatkan total capaian sebesar 120%. Realisasi ini berhasil melampaui target 100% yang telah ditetapkan.

**ii. Indikator Kinerja Utama (IKU) 7b-CP: Tingkat Efektivitas Penagihan**

Perbandingan antara target dan realisasi Efektivitas Penagihan tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel II.13**

**Perbandingan Target dan Realisasi Efektivitas Penagihan**

Variabel IKU	Realisasi	Bobot IKU	Realisasi IKU
Variabel Tindakan penagihan	137,28%	50%	68,64%
Variabel tindak lanjut DSPC	120,00%	20%	24,00%
Variabel pencairan	71,59%	30%	21,48%
<b>TOTAL</b>			114,12%
<b>Indeks Capaian IKU = (Total / 75%) x 100%</b>			<b>152,16%</b>

Realisasi efektivitas penagihan tahun 2024 mendapatkan nilai capaian maksimal yaitu 120%.

Tindakan penagihan yang telah dilakukan antara lain Surat Teguran dari target 749 terealisasi sebanyak 1.444, Surat Paksa dari target 535 terealisasi sebanyak 642, Pemblokiran dari target 12 terealisasi 13, Penyitaan (SPMP) dari target 22 terealisasi 39, Penjualan Barang Sitaan dari target 3 terealisasi 4.

Tercapainya IKU Efektivitas Penagihan mengindikasikan bahwa KPP Madya Semarang telah berusaha semaksimal

mungkin untuk melakukan tindakan penagihan aktif guna menunjang penerimaan negara melalui tindakan pemeriksaan dan penagihan.

### iii. Indikator Kinerja Utama (IKU) 7c-N: Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

IKU persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan merupakan IKU baru yang dilakukan pada KPP Madya Semarang. Sesuai data pada laman mandor-djp/ disebutkan bahwa capaian IKU yang diperoleh KPP Madya Semarang adalah sebesar 100%. Perbandingan antara target dan realisasi penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel II.14**  
**Perbandingan antara target dan realisasi penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan**

Target	Realisasi	Capaian IKU
1	1	100%

Awal masalah yang dihadapi dari IKU ini adalah belum ditemukannya wajib pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Pada Bulan Oktober 2024 telah disetujui usulan pemeriksaan bukti permulaan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I dengan Berita Acara Nomor BA-50/USULBP/WPJ.10/2024 tanggal 24 Oktober 2024.

### Sasaran Strategis 8: Data dan Informasi yang Berkualitas

#### i. Indikator Kinerja Utama (IKU) 08a-CP: Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

Perbandingan antara realisasi dan capaian persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel II.15**

**Perbandingan antara realisasi dan capaian Persentase Penyelesaian  
Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan**

<b>Realisasi</b>	<b>Capaian IKU</b>
122,56%	120%

Total kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh KPP Madya Semarang selama tahun 2024 adalah 6 kegiatan. Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 ini adalah melaksanakan kegiatan pengamatan dan membuat alat keterangan.

**Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif (*Learning & Growth Perspective*).**

**i. Indikator Kinerja Utama (IKU) 09a-N: Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM**

Perbandingan antara target dan realisasi persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel II.16**

**Perbandingan Target dan Realisasi Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi**

Persentase Pejabat Struktural yang memenuhi standar kompetensi			Persentase Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum yang memenuhi standar kompetensi			Realisasi
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%
11	11	100%	19	19	100%	100%

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas pegawai untuk menunjang terwujudnya sistem manajemen Sumber Daya Manusia berbasis kinerja dan kompetensi, maka seluruh SDM di KPP Madya Semarang yang berjumlah 117 pegawai telah diikutsertakan dalam berbagai pelatihan dan telah memenuhi standar kompetensi.

Realisasi persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tahun 2024 telah melampaui target 100% yang telah ditetapkan. Sehingga Indeks Capaian IKU maksimal sebesar 117,49%.

**ii. Indikator Kinerja Utama (IKU) 9b-N: Indeks Penilaian Integritas Unit**

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 sebesar 95,94% dari target 85 dengan capaian 112,87%

Formula penghitungan IKU tingkat efektivitas pemeriksaan adalah dengan cara menambahkan (25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak).

Pada tahun 2024, KPP Madya Semarang berhasil mendapatkan total capaian sebesar 112,87%. Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit didapatkan melalui Hasil Survei Penilaian Integritas Unit di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2024.

### **iii. Indikator Kinerja Utama (IKU) 9c-N: Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko**

Dialog Kinerja Organisasi (DKO) adalah komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode sebagaimana tercantum dalam lampiran KMK- 590/KMK.01/2016, sedangkan Rencana Mitigasi Risiko merupakan bagian dari proses Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, analisis status Indikator Risiko Utama (IRU) serta tren perubahan besaran/Level Risiko.

Terdapat 10 unsur penilaian DKO yang menentukan realisasi poin efektifitas DKO dan Pemantauan Rencana Aksi. Unsur-unsur penilaian DKO adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rapat;
2. Tanggal pelaksanaan DKO
3. Kehadiran kepala unit kerja selama rapat evaluasi;
4. Risalah Rapat;
5. Matriks Tindak Lanjut sesuai lampiran II KMK-590/KMK.01/2016
6. Laporan Pemantauan Triwulanan sesuai KMK-845/KMK.01/2016;
7. Umpan balik pelaksanaan Dialog Kinerja;
8. Tingkat efektifitas waktu Dialog Kinerja;
9. Laporan Pemantauan MR Triwulanan; dan
10. Formulir III Rencana Mitigasi Risiko.

Berdasarkan 10 unsur penilaian tersebut, realisasi efektifitas DKO dan Rencana Mitigasi Risiko ada di angka 100% dan telah melampaui target 90% yang telah ditetapkan. Meskipun realisasi telah mencapai 100%, akan tetapi Indeks Capaian IKU ini hanya ada di angka 111,11%. Hal ini dikarenakan IKU Persentase Efektivitas DKO dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan adalah salah satu IKU yang indeks capaiannya tidak bisa menyentuh angka maksimal 120%.

**Sasaran Strategis 10: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel  
(Learning and Growth Perspective)**

**i. Indikator Kinerja Utama (IKU) 10a-CP: Indeks Kinerja  
Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

Perbandingan antara target dan realisasi Persentase kualitas pelaksanaan anggaran disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel II.17**

**Perbandingan Target dan Realisasi Persentase kualitas  
pelaksanaan anggaran**

No	Uraian	Target	Realisasi
1	% Revisi DIPA	10%	10%
2	% Deviasi Halaman III DIPA	10%	10%
3	% Penyerapan Anggaran	20%	20%
4	% Belanja Kontraktual	10%	10%
5	% Penyelesaian Tagihan	10%	10%
6	Pengelolaan UP dan TUP	10%	10%
7	Dispensasi SPM	5%	5%
8	Capaian Output	25%	25%
Capaian IKPA Januari s.d. Desember 2024		95,50%	96,25%

1	Capaian SMART	Target	Realisasi
Capaian SMART		95,50%	100%

IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran bertujuan untuk Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi penyerapan atas Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output serta Capaian SMART.

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember dan 60% Capaian SMART. Realisasi Capaian IKPA Januari s.d. Desember 2024 sebesar 96,25% dari target 95,50%. Realisasi Capaian SMART sebesar 100% dari target 95,50%.

Dari target 95,50% yang telah ditetapkan, pada tahun 2024 KPP Madya Semarang dapat merealisasikan sebesar 120% dengan Indeks Capaian IKU mencapai 98,12%.

Capaian pada IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tidak dapat memenuhi target dikarenakan adanya nilai salah satu indikator efisiensi yang terdapat di aplikasi SMART rendah, dimana nilai efisiensi tersebut berbanding terbalik dengan indikator penyerapan yang tinggi.

#### **a. Kinerja Lainnya**

Selama tahun 2024, KPP Madya Semarang juga telah mencetak beberapa prestasi antara lain dapat mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tingkat nasional sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Peningkatan semangat anti korupsi serta pelayanan publik tidak serta merta berhenti setelah memperoleh predikat WBBM. Dalam perjalanannya, KPP Madya Semarang kerap menggelar *sharing session* atau diskusi bersama mengenai capaian ZI-WBK dan WBBM bersama unit kerja lainnya, tidak hanya terbatas pada lingkup Kementerian Keuangan saja.

#### **b. Realisasi Anggaran**

KPP Madya Semarang adalah salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pelaksanaan kerjanya. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pelaporan yang dimaksud disajikan secara terpisah dari Laporan Kinerja ini dan dapat dilihat pada Laporan Keuangan KPP Madya Semarang tahun 2024.

Penyerapan PAGU DIPA untuk barang tahun 2024 adalah sebesar Rp 5.107.676.420,00 atau 94,67% dari pagu DIPA tahun 2024 sebesar Rp 5.395.295.000,00. Sementara PAGU DIPA untuk belanja pegawai terealisasi

sebesar Rp 853.224.000,00 atau 97,35% dari PAGU Rp. 876.412.000,00. Kemudian penyerapan untuk belanja modal tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.559.202.968,00 atau 99,70% dari pagu DIPA tahun 2024 sebesar Rp 1.563.923.000,00.

## BAB IV PENUTUP

Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja KPP Madya Semarang untuk tahun 2024 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian beberapa program kegiatan, baik *output* maupun *outcome*-nya menunjukkan hasil yang baik. Sasaran utama yang ingin dicapai yaitu merealisasikan target penerimaan yang diamanahkan pada KPP Madya Semarang berhasil terpenuhi target 100,19%. Target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil tercapai karena beberapa faktor diantaranya Tercapainya target penerimaan pajak dari kegiatan PPM yang dipengaruhi salah satunya dari hasil kegiatan pengujian kepatuhan material baik dari kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan.

Dengan menyadari kekurangan dalam pelaksanaan kinerja tahun 2024 dan untuk mempertahankan prestasi dalam pemenuhan target penerimaan pajak yang diamanahkan pada KPP Madya Semarang tahun 2025, maka diperlukan kerja yang lebih keras dan komitmen yang tinggi dengan selalu berpegang pada nilai – nilai Kementerian Keuangan (integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan) dari seluruh pegawai agar dapat merealisasikan target penerimaan di tahun 2025.

Semarang, 22 Januari 2025

Kepala KPP Madya Semarang

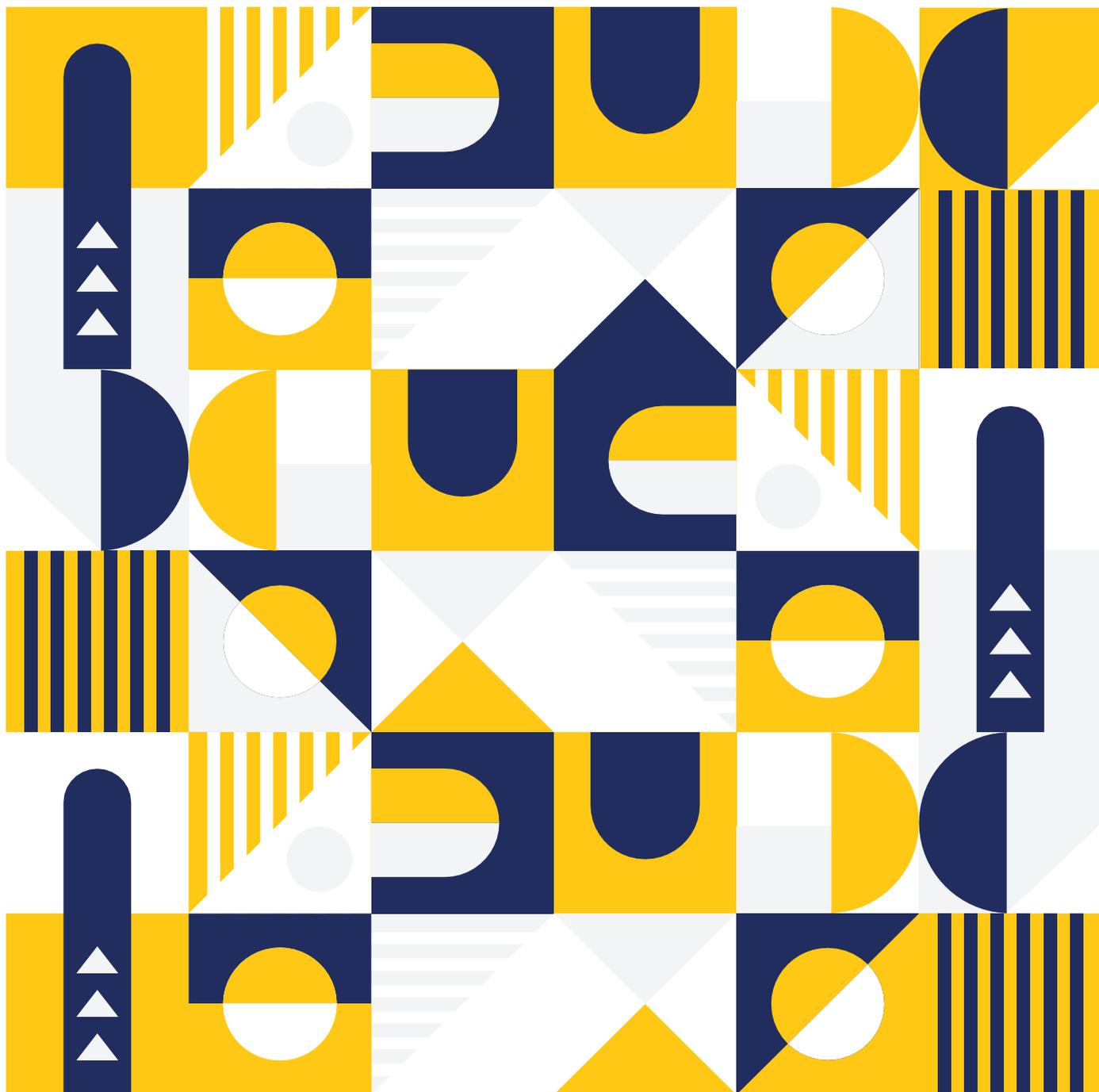


Ditandatangani secara elektronik

Artiek Purnawestri







KANTOR PELAYANAN PAJAK  
**MADYA SEMARANG**

Jl. Pemuda No. 46, Semarang, Jawa Tengah 50138  
Telepon (024) 3552562, 3552563, 3522162; Faksimile (024) 3552564



pajakmadyasmg



pajakmadyasmg



KPP Madya Semarang



KPP Madya Semarang



[linktr.ee/KPPMadya](https://linktr.ee/KPPMadya)



081 584 500 511